



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



Buat Tulisan

- [News](#)[Entertainment](#)[Bisnis](#)[Otomotif](#)[Tekno & Sains](#)[Mom](#)[Woman](#)[Food & Travel](#)[Bola & Sports](#)[Bolanita](#)[Lainnya](#)
- [Properti](#)[Pangan](#)[Makro](#)[Finansial](#)[Energi](#)[Sektor Riil](#)[Market](#)[Infrastruktur](#)[Ekonomi Digital](#)



Edit



Hapus

Beranda > Bisnis

Konten dari Pengguna

Pajak UMKM Semakin Ketat Saat Usaha Kecil Justru Butuh Ruang Tumbuh



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Tulisan dari Aurelia Melinda Nisita Wardhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Pajak UMKM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang memperketat akses fasilitas pajak penghasilan final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai warga yang setiap hari berinteraksi dengan pelaku usaha kecil, dari warung kopi langganan hingga penjahit di ujung gang, saya merasakan kegelisahan yang sama dengan mereka. Fasilitas pajak yang selama ini menjadi penopang kelangsungan usaha kini tidak lagi mudah diakses, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya berpihak kepada usaha kecil.



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Artikel ini saya tulis setelah menyimak sebuah wawancara televisi bersama Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Hermawati Setiorini. Dalam wawancara tersebut, ia menyampaikan keresahan para pelaku usaha terhadap kebijakan yang dinilai terlalu terburu-buru di tengah tekanan nilai tukar dan lesunya daya beli masyarakat. Sebagai akademisi yang mengkaji transformasi digital dan kebijakan publik, saya terdorong untuk menganalisis lebih jauh dampak kebijakan ini terhadap pengembangan usaha kecil di Indonesia.

Fenomena ini menarik karena memperlihatkan ketegangan klasik antara niat baik regulasi dan realitas di lapangan. Pemerintah ingin memastikan fasilitas pajak tidak disalahgunakan oleh pengusaha nakal yang memecah usaha demi menikmati tarif rendah. Namun cara



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Ilustrasi : Foto pelaku usaha kecil di kios atau warung yang sedang melayani pembeli, dengan suasana pasar tradisional (sumber : chatgpt.com)

Pajak UMKM dan Dilema Waktu Penerapan Kebijakan

Pajak UMKM dengan skema final bertarif rendah selama ini menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menarik usaha kecil masuk ke sistem perpajakan formal. Kesederhanaannya membuat pelaku usaha yang tidak memiliki staf akuntansi tetap bisa memenuhi kewajiban tanpa beban administrasi berarti. Ketika akses terhadap fasilitas ini diperketat, yang dipertaruhkan bukan sekadar besaran setoran pajak, melainkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem itu sendiri.

ADVERTISEMENT



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



40



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

menegaskan bahwa kebijakan ini bukan prioritas di tengah situasi ekonomi yang masih menekan, apalagi nilai tukar rupiah sedang melemah dan ongkos produksi terus merangkak naik. Pendapatan banyak pelaku usaha kecil dikabarkan menyusut drastis dibanding masa sebelumnya, sebagian bahkan hanya mampu mempertahankan sebagian kecil dari omzet normalnya. Menambah beban pajak di saat seperti ini ibarat menaikkan tarif tol ketika kendaraan sedang kehabisan bahan bakar.

Dari kaca mata asosiasi, langkah yang lebih tepat justru menurunkan pajak konsumsi agar masyarakat kembali bergairah berbelanja. Ketika daya beli pulih, omzet pelaku usaha naik, dan penerimaan negara akan mengikuti secara alami tanpa perlu memaksa dari sisi hulu. Logika ini sederhana namun sering terabaikan dalam perumusan kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada target penerimaan jangka pendek.

ADVERTISEMENT



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



40



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Saya melihat ada pelajaran penting di sini tentang urutan prioritas kebijakan. Menutup celah penyalahgunaan memang perlu, tetapi pengawasan internal terhadap wajib pajak yang terindikasi memecah usaha seharusnya didahulukan sebelum aturan umum diberlakukan kepada semua pihak. Data kepemilikan badan usaha sesungguhnya sudah tersedia di tangan otoritas, sehingga pendekatan yang lebih presisi sangat mungkin dilakukan.

Kerumitan Administrasi sebagai Hambatan Tersembunyi

Kerumitan administrasi perpajakan adalah hambatan yang jarang dibicarakan namun paling dirasakan pelaku usaha kecil. Dengan skema final yang sederhana saja banyak pelaku usaha masih kebingungan tentang cara membayar, apalagi jika mereka harus beralih ke skema umum dengan pembukuan yang jauh lebih kompleks. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, transisi yang

**Aurelia Melinda Nisita Wardhani**

News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Sebagai pengamat sistem informasi, saya melihat persoalan ini sebagai kegagalan desain layanan publik digital. Formulir yang bertingkat-tingkat, kolom isian yang membingungkan, dan proses restitusi yang berlarut-larut adalah gejala dari sistem yang dirancang dari sudut pandang birokrasi, bukan dari sudut pandang pengguna. Prinsip dasar perancangan pengalaman pengguna mengajarkan bahwa setiap langkah tambahan dalam sebuah proses akan menggugurkan sebagian pengguna di tengah jalan, dan hal yang sama berlaku pada kepatuhan pajak.



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



40



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

pembenahan sistem justru sering datang belakangan setelah kebijakan menuai gejolak di lapangan.

ADVERTISEMENT

Partisipasi Publik yang Terabaikan dalam Perumusan Kebijakan

Partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan ini nyaris tidak terdengar, dan inilah yang paling disesalkan asosiasi. "Jujur kita kaget juga, tiba-tiba sudah ada PP ini," ujar Hermawati dalam wawancara tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa surat permohonan



Aurelia Melinda Nisita Wardhani

[News](#) [Entertainment](#) [Bisnis](#) [Otomotif](#) [Tekno & Sains](#) [Mom](#) [Woman](#) [Food & Travel](#) [Bola & Sports](#) [Bolanita](#) [Lainnya](#)[Properti](#) [Pangan](#) [Makro](#) [Finansial](#) [Energi](#) [Sektor Riil](#) [Market](#) [Infrastruktur](#) [Ekonomi Digital](#)

pentak, melainkan juga persoalan kualitas kebijakan. Regulasi yang disusun tanpa masukan dari pihak yang paling terdampak cenderung meleset dari realitas lapangan dan akhirnya membutuhkan revisi berulang. Dalam pengembangan sistem, kita mengenal prinsip melibatkan pengguna sejak awal perancangan, dan prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam perumusan kebijakan fiskal.

ADVERTISEMENT

Kegaduhan yang muncul setelah aturan terbit sesungguhnya bisa dicegah dengan komunikasi publik yang terencana. Penjelasan pejabat yang disampaikan sambil lalu kepada media justru



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

ilustrasi: lustrasi timbangan yang menyeimbangkan dokumen pajak di satu sisi dan produk usaha kecil di sisi lain (sumber: chatgpt.com)

Jargon usaha kecil naik kelas akan kehilangan makna jika kebijakan yang menyertainya justru memperberat langkah mereka. Tanpa aturan baru ini pun laju pertumbuhan usaha kecil sudah melambat akibat banjir produk impor yang nyaris tanpa pengawasan berarti. Menambahkan beban pajak tanpa membenahi persoalan struktural tersebut sama saja dengan meminta pelari yang cedera untuk mempercepat langkahnya.

Jalan tengah sesungguhnya tersedia jika pemerintah bersedia bersabar. Masa transisi yang memadai, sosialisasi yang masif hingga ke pelosok, serta penindakan yang terarah kepada penyalah guna fasilitas akan jauh lebih diterima ketimbang pemberlakuan serentak yang mengejutkan. Insentif bagi pelaku usaha yang patuh juga layak dipertimbangkan sebagai penyeimbang, sebab selama ini mereka merasa terus dimintai kewajiban tanpa memperoleh manfaat yang sepadan.

**Aurelia Melinda Nisita Wardhani**

40



News Entertainment Bisnis Otomotif Tekno & Sains Mom Woman Food & Travel Bola & Sports Bolanita Lainnya

Properti Pangan Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Bagi saya, topik ini menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada usaha kecil tidak cukup diucapkan dalam pidato dan slogan.

Keberpihakan sejati terlihat dari cara negara merancang sistem yang memudahkan, mendengarkan suara pelaku usaha sebelum aturan diteken, dan memilih waktu penerapan yang tidak menambah luka di tengah tekanan ekonomi. Pajak adalah kontrak sosial, dan kontrak yang sehat selalu dibangun di atas dialog, bukan kejutan.

Pada akhirnya, penerimaan negara yang berkelanjutan hanya akan lahir dari ekosistem usaha yang sehat dan bergairah. Merawat kepercayaan jutaan pelaku usaha kecil jauh lebih berharga daripada tambahan setoran jangka pendek yang diperoleh dengan mengorbankan keberlangsungan mereka. Semoga pemerintah masih



Aurelia Melinda Nisita Wardhani



40



- News

Entertainment

Bisnis

Otomotif

Tekno & Sains

Mom

Woman

Food & Travel

Bola & Sports

Bolanita

Lainnya
- Properti

Pangan

Makro

Finansial

Energi

Sektor Riil

Market

Infrastruktur

Ekonomi Digital

Pajak



Tim Editor

